

KAJIAN PERMINTAAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MELALUI PNPB DI PERPUSTAKAAN BSN

Abdul Rahman Saleh¹, Erni Sumarni², Muhammad Bahrudin³, Nursidik Fadilah⁴

Abstrak

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI tersebut didistribusikan oleh BSN dengan beberapa cara antara lain pada tahun pertama ditetapkan. SNI dapat diakses melalui website BSN. Selain itu, SNI juga didistribusikan ke sekretariat komite teknis yang ada di kementerian/lembaga untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan fungsinya. Cara distribusi yang lain adalah melalui PNPB atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. Dengan cara PNPB ini, pengguna harus mengganti biaya reproduksi senilai tertentu. Kajian ini dimaksudkan mempelajari permintaan SNI oleh pemangku kepentingan yang diminta melalui PNPB selama tahun 2012--2015. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih banyak SNI dengan penetapan lama yang masih diminta oleh pemangku kepentingan.

Kata kunci : standardisasi; SNI; Standar Nasional Indonesia; Badan Standardisasi Nasional; BSN.

Abstract

Indonesia National Standard (SNI) is a list of standards approved by the National Standard Board (BSN). SNIs are distributed by BSN through certain ways such as the BSN official website. SNI can also be distributed to Technical Committee secretariats in ministries/institutions to be used relevantly by stakeholders. The other way of distribution is through Non-Tax National Income (PNPB) procedure. By using this procedure, applicants have to pay for a certain amount of fee in turn for reproduction process. This study is aimed at observing demands of SNI from stakeholders made through PNPB procedure during 2012 to 2015. The result shows that there are considerably high number of demands for old SNI made by stakeholders.

Key words : Standardization, SNI, Indonesia National Standard, National Standard Board, BSN

1. Pendahuluan

Istilah standar mengacu pada persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan,

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya (BSN, 2015). Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara

¹ Pustakawan utama yang sedang dibebaskan sementara. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (BSN)

² Pustakawan madya pada Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

³ Pustakawan pertama (sedang dalam proses pengangkatan) pada Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

⁴ Calon pustakawan pada Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang saat ini bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab, BSN menetapkan produk standar yang disebut SNI (*Standar Nasional Indonesia*). SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BSN memiliki peran untuk menyebarkan budaya standar dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu unit kerja BSN yang berperan dalam penyebaran budaya standar ini adalah perpustakaan. Perpustakaan BSN mengelola koleksi dokumen standar, baik itu SNI maupun standar mancanegara seperti ISO, IEC, ASTM, dan lain-lain.

Dokumen standar (BSN, 2015) merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan yang belum begitu populer bagi banyak perpustakaan. Terbukti banyak perpustakaan yang belum menjadikan dokumen standar sebagai salah satu koleksinya. Dokumen standar merupakan dokumen yang berisi ketentuan atau spesifikasi atau suatu persyaratan tertentu yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Pengertian yang lebih spesifik adalah dokumen yang berisi spesifikasi teknis yang dibuat berdasarkan kesepakatan (*konsensus*) para pengguna suatu barang/jasa (*stakeholders*) dan digunakan secara berulang (BSN, 2015). Perpustakaan BSN merupakan perpustakaan yang salah satu tugasnya adalah melayani distribusi dokumen SNI tersebut ke masyarakat, khususnya yang menjadi pemangku kepentingan bidang standardisasi.

Jumlah koleksi SNI perpustakaan BSN adalah sebesar 10.660 SNI pada tahun 2015. Sebagian dari SNI tersebut sudah diabolisi atau ditarik dari peredaran karena sudah tidak sesuai

dengan perkembangan baik ilmu pengetahuan, teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Jumlah SNI yang diabolisi adalah sejumlah 1.866 SNI. Dengan demikian, SNI yang masih aktif dan bisa digunakan oleh masyarakat adalah sebesar 8.794 SNI.

Berdasarkan data jumlah SNI tersebut, penulis ingin mengkaji seberapa banyak jumlah SNI yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat melalui Perpustakaan BSN. Penulis membatasi kajian ini berdasarkan permintaan dokumen SNI melalui layanan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang menjadi salah satu layanan yang diberikan oleh Perpustakaan BSN.

2. Tujuan dan Manfaat Kajian

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk (i) mengetahui peta permintaan SNI melalui layanan PNBPN selama tahun 2012—2015, (ii) mengetahui SNI yang tidak pernah diminta selama tahun 2012--2015, dan (iii) mengetahui peta pengguna SNI sesuai dengan kelompok pemangku kepentingan.

Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini akan bermanfaat untuk (i) menghasilkan rekomendasi bagi pihak terkait untuk melakukan prioritas kaji ulang SNI, (ii) memberikan masukan bagi BSN terkait perlunya pemasyarakatan SNI, dan (iii) memberikan masukan bagi BSN, khususnya perpustakaan untuk mengatur distribusi SNI.

3. Metodologi Kajian

Kajian ini merupakan kajian deskriptif komparatif. Menurut Whitney dalam Nazir (2005), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tatacara yang berlaku dalam masyarakat, situasi termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, dan pengaruh dari suatu fenomena (Hasan, 2004). Dalam metode

deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan studi komparatif. Menurut Nazir (2005), penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan sebab penelitian komparatif tidak mempunyai kontrol. Metode penelitian komparatif merupakan *ex post facto*. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian selesai berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab-akibat dari data yang tersedia.

Kajian ini mempelajari permintaan SNI kepada Perpustakaan BSN oleh masyarakat pemangku kepentingan melalui PNBPN selama tahun 2012--2015. Data permintaan SNI kepada Perpustakaan BSN melalui PNBPN dari masyarakat pada tahun 2012--2015 diambil dari basis data SIM Pustaka. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan basis data koleksi SNI yang ada dalam Sistem Informasi SNI. Jika data SNI ada dalam kedua basis data, data dicatat dalam tabel SNI yang pernah diminta dalam kurun waktu tahun 2012--2015. Sisanya adalah SNI yang tidak pernah diminta lagi selama kurun tahun 2012--2015. Tabel tersebut kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulannya.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

Menurut SNI 7496:2009, perpustakaan khusus instansi pemerintah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya. Kemudian, untuk mendukung misi tersebut, perpustakaan khusus instansi pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya;
- b) menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya;
- c) menjadi *vocal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya;
- d) menjadi pusat referal dalam bidang yang sesuai dengan lembaga induknya;
- e) mengorganisasi materi perpustakaan;
- f) mendayagunakan koleksi;
- g) menerbitkan literatur sekunder dan tersier dalam bidang lembaga induknya, baik cetak maupun elektronik;
- h) menyelenggarakan pendidikan pengguna;
- i) menyelenggarakan kegiatan literasi informasi untuk pengembangan kompetensi SDM lembaga induknya;
- j) melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif;
- k) ikut serta dalam kerja sama perpustakaan serta jaringan informasi;
- l) menyelenggarakan otomasi perpustakaan;
- m) melaksanakan digitalisasi materi perpustakaan;
- n) menyajikan layanan koleksi digital; dan
- o) menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global (BSN, 2009).

Terkait dengan topik kajian ini, Perpustakaan BSN termasuk dalam jenis perpustakaan khusus instansi pemerintah. Tugas dan fungsi yang relevan terkait peran Perpustakaan BSN dalam mendistribusikan SNI sebagai proses penyebarluasan informasi standar kepada masyarakat adalah terkait dengan tugasnya untuk memberikan jasa perpustakaan dan informasi serta fungsinya untuk menjadi *focal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya. Dalam hal ini SNI merupakan produk terbitan BSN. Fokus kajian ini adalah pada peran Perpustakaan BSN dalam mendistribusikan SNI melalui layanan PNBPN kepada masyarakat.

4.2 Standar dan Manfaat Standar

Dokumen standar merupakan salah satu jenis koleksi perpustakaan yang termasuk ke dalam kelompok *literatur primer* (Saleh dan Mustafa, 2009). Namun demikian, tidak banyak perpustakaan yang menyadari pentingnya peran dokumen standar untuk mendukung referensi informasi dalam bidang industri dan perdagangan. Saat ini, ketika era perdagangan bebas dimulai, standar memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing produk dan jasa yang diperdagangkan.

Secara umum standar didefinisikan sebagai (i) ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan; (ii) sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga); dan (iii) baku (Pusat Bahasa, Depdiknas, 2008). Menurut Sunarya (2012), dokumen tertulis berisi spesifikasi/ketentuan teknis yang digunakan secara berulang dan disepakati secara konsensus oleh pihak-pihak yang mempengaruhi pasar (produsen dan konsumen) yang juga melibatkan fasilitator, yaitu regulator dan para pakar. Saat ini peran standar semakin dirasakan sangat penting terutama dalam rangka meningkatkan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan. Selain itu, kontribusi istimewa standar di antaranya untuk melindungi masyarakat terkait kesehatan, keselamatan, keamanan, dan pelestarian lingkungan hidup atau yang dikenal dengan K3L. Secara umum penggunaan standar memberikan manfaat seperti (BSN, 2014), yaitu (i) memperlancar transaksi arus barang dan jasa dalam perdagangan domestik atau internasional untuk menghilangkan hambatan teknis dalam perdagangan melalui harmonisasi standar; (ii) membantu mempercepat diseminasi sistem manajemen, teknologi, dan inovasi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah di banyak negara termasuk di negara-negara berkembang; (iii) meningkatkan daya saing bisnis dengan fokus pada mutu, keamanan, keselamatan, kesehatan,

dan pelestarian lingkungan; (iv) memfasilitasi penilaian dan pembuktian kesesuaian; dan (v) mengoptimalkan infrastruktur standardisasi.

4.3 Prinsip Penerapan Standar

Penerapan standar merupakan kegiatan menerapkan persyaratan standar terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personel. Suatu standar dibuat melalui kesepakatan atau konsensus, memberikan sifat yang pada dasarnya ialah *voluntary* (sukarela) (BSN, 2014). Penerapan standar secara *voluntary* didasarkan oleh inisiatif dari organisasi/*personel* sendiri. Tentunya upaya untuk menerapkan standar tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk memberi jaminan bahwa produk sesuai dengan keinginan konsumen atau pembeli karena konsumen menginginkan produk dengan mutu tertentu.

Dengan demikian, penerapan standar akan memberikan kontribusi nyata terhadap keuntungan suatu organisasi dan meningkatkan daya saing produk. Namun, adakalanya standar yang dikeluarkan terkait dengan faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, dan fungsi lingkungan hidup. Standar yang dimaksud dapat diberlakukan secara wajib (*mandatory/compulsory*). Berbeda dengan penerapan standar secara *voluntary*, standar yang diberlakukan wajib bersifat mengikat. Artinya, harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terkait, yaitu produsen, pengedar barang/jasa, atau pengguna standar lainnya. Pemberlakuan standar secara wajib diatur oleh suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah (regulator/kementerian/lembaga).

4.4 Jenis Standar

Berdasarkan lingkup beroperasinya standar, standar digolongkan menjadi (i) standar individu; (ii) standar perusahaan; (iii) standar asosiasi; (iv) standar nasional; (v) standar regional; dan (vi) standar internasional (BSN,

2009). SNI merupakan standar yang memiliki ruang lingkup operasi di tingkat nasional, yaitu Republik Indonesia.

4.5 Pengguna Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengguna Standar Nasional Indonesia atau SNI terdiri dari empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu (i) pelaku usaha/industri; (ii) pemerintah atau regulator; (iii) pakar dan akademisi; dan (iv) masyarakat umum atau termasuk konsumen. Pengguna SNI tersebut dapat memperoleh dokumen SNI dari berbagai saluran yang berujung di Perpustakaan BSN. melalui perpustakaan, BSN mendistribusikan SNI ke masyarakat yang menjadi pemangku kepentingannya seperti ke sekretariat komite teknis, kementerian/lembaga, universitas yang memiliki kerja sama dengan BSN, dan lain-lain.

4.6 PNBP

Pada dasarnya penerimaan negara terbagi atas dua jenis, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang (Wikipedia, 2015). Penyelenggaraan PNBPN ini biasanya dilakukan terhadap layanan-layanan yang belum mampu dibiayai oleh negara melalui APBN. Dalam hal ini instansi pemerintah penyelenggara PNBPN mengenakan biaya terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat.

PNBP dipungut atau ditagih oleh instansi pemerintah dengan perintah undang-undang atau peraturan pemerintah atau penunjukan dari menteri keuangan berdasarkan rencana PNBPN yang dibuat oleh pejabat instansi pemerintah. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh pejabat instansi pemerintah kepada menteri keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi PNBPN. BSN memberikan layanan reproduksi SNI kepada masyarakat dengan PNBPN yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Standardisasi Nasional.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 Pengguna Dokumen SNI

Permintaan SNI melalui PNBPN selama empat tahun dari tahun 2012--2015 dilakukan oleh sebanyak 2.998 pemangku kepentingan. 1.943 di antaranya merupakan lembaga atau perusahaan dan 1055 pemangku kepentingan berupa individu/pribadi dengan jumlah transaksi sebesar 16.257 permintaan SNI. Tabel 1 berikut memperlihatkan komposisi pemangku kepentingan yang melakukan transaksi permintaan SNI.

Tabel 1:
Jumlah Kelompok Pemangku Kepentingan Pengguna SNI \ Tahun 2012--2015

Kelompok	Jumlah
Pelaku usaha	1.605
Pemerintah	181
Akademisi	157
Masyarakat/konsumen	1.055
Total	2.998

Sebagian besar permintaan SNI melalui PNBPN kepada Perpustakaan BSN datang dari kelompok Pelaku Usaha, yaitu sebesar 10.365 (63,76%) transaksi pada tahun 2012--2015. Hal itu diikuti oleh kelompok akademisi sebesar

2.513 (15,46%) transaksi. Posisi ketiga adalah permintaan dari instansi pemerintah dengan jumlah transaksi sebesar 2.324 (14,30%). Permintaan terakhir adalah dari masyarakat umum atau konsumen, yaitu sebesar 1.055 (6,49%) transaksi. Tabel 2 berikut memperlihatkan gambaran jumlah permintaan SNI dari masing-masing kelompok pengguna.

Tabel 2:
Jumlah Transaksi Permintaan SNI oleh Kelompok Pemangku Kepentingan Tahun 2012—2015

Kelompok Pemakai	Jumlah Permintaan	%
Pelaku usaha	10.365	63,76
Pemerintah	2.324	14,30
Akademisi	2.513	15,46
Masyarakat/konsumen	1.055	6,49
Total	16.257	100

5.2 Dokumen SNI yang Diminta

Dokumen SNI diperoleh melalui berbagai macam cara, yaitu melalui (i) pengunduhan satu tahun pertama semenjak SNI ditetapkan, (ii)

permintaan ke Perpustakaan BSN via PNBPN, (iii) sekretariat komite teknis yang ada di kementerian, dan (iv) saluran-saluran lain. Pemanfaatannya tentu bermacam-macam juga tergantung dari jenis pemakainya, yaitu sebagai berikut

1. referensi untuk menjamin mutu produk, seperti penerapan SNI dalam proses produksi, SMM, SNI produk;
2. acuan pengujian, sertifikasi SNI, *mutual recognition arrangement* (MRA) dan *multi lateral recognition arrangement* (MLA);
3. adopsi SNI menjadi regulasi teknis, berperan dalam penerapan SNI, pengawasan, dan pembinaan;
4. acuan/referensi penelitian, inovasi teknologi, dan produk;
5. referensi menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan; dan
6. referensi pendidikan dan penelitian profesi (mahasiswa, dosen, peneliti, pustakawan).

Tabel 3:
Jumlah SNI yang Diminta melalui PNBPN selama tahun 2012—2015 Berdasarkan Tahun SNI

Tahun SNI Diminta	Jumlah SNI Diminta pada Tahun				Total Permintaan selama 4 Tahun
	2012	2013	2014	2015	
1987	16	-	-	34	50
1988	-	31	33	-	64
1989	157	143	189	139	628
1990	35	-	-	25	60
1991	71	49	55	46	221
1992	75	157	152	95	479
1993	-	-	-	-	-
1994	61	54	29	47	191
1995	75	85	75	51	286
1996	90	74	61	225	450
1997	3	7	4	7	21
1998	110	132	110	105	457
1999	63	43	55	25	186
2000	116	158	94	70	438
2001	54	81	39	22	196
2002	154	168	95	91	508
2003	23	36	22	24	105
2004	34	61	40	59	194
2005	73	100	90	79	342
2006	60	55	38	60	213
2007	18	45	43	4	110
2008	75	103	74	105	357
2009	128	169	129	161	587
2010	77	102	70	117	366
2011	84	258	115	161	618
2012	29	131	91	135	386
2013	-	70	122	122	314
2014	-	-	58	118	176
2015	-	-	-	66	66

Permintaan SNI yang dicatat oleh BSN yang paling lengkap adalah permintaan via PNPB. Data permintaan PNPB pertahun selama 4 tahun terakhir (tahun 2012--2015) terlihat pada Tabel 3. Dari Tabel 3 tersebut terlihat bahwa SNI yang ditetapkan di atas lima tahun terakhir masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan teori, sebuah standar idealnya setiap lima tahun terakhir dikaji ulang agar sebuah standar dapat terus sesuai dengan perkembangan zaman, baik dari aspek perkembangan ilmu dan teknologi maupun kebutuhan pasar.

Dari Tabel 3 juga terlihat bahwa SNI yang ditetapkan pada tahun tertentu dan diminta pada tahun yang sama jumlahnya sangat sedikit. Sebagai contoh pada tahun 2012 SNI penetapan tahun 2012 yang diminta hanya berjumlah 29 SNI. Padahal, jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun 2012 berjumlah 323 SNI (PUSIDO-BSN, 2013), tahun 2013 hanya 70 SNI, tahun 2014 hanya 58, dan tahun 2015 hanya 66 SNI. Ada dua hal yang mungkin menyebabkan hal demikian, yaitu (i) SNI yang baru ditetapkan tersebut belum dikenal/diketahui oleh masyarakat sehingga belum banyak diminta dan (ii) SNI tersebut dapat diperoleh secara gratis dengan mengunduhnya dari situs *web* BSN.

Jika penyebab pertama yang terjadi, pihak

BSN harus lebih gencar lagi mempromosikan SNI yang baru ditetapkan supaya masyarakat bisa lebih cepat mengetahui dan menggunakan. Namun demikian, penerapan standar baru biasanya tidak serta merta menggantikan penerapan standar yang lama. Perlu proses dan penyesuaian-penyesuaian. Apalagi penerapan standar di perusahaan atau lembaga yang telah disertifikasi dengan standar sebelumnya. Oleh karena itu, standar baru atau yang baru ditetapkan tidak serta merta diminta oleh masyarakat atau pengguna standar. Jika kemungkinan kedua yang terjadi, wajar pengguna standar tidak segera meminta via PNPB karena pengguna masih bisa memperoleh dokumen standar baru tersebut secara gratis dengan mengunduhnya dari situs *web*nya BSN.

Dalam kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2012--2015 dokumen SNI yang diminta tersebut ada yang selalu diminta setiap tahun, tetapi ada yang hanya muncul di satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Oleh karena itu, jumlah permintaan selama empat tahun tersebut tidak bisa langsung dijumlah dari permintaan masing-masing tahun, namun harus dilihat permintaan selama empat tahun terakhir. Jumlah tersebut adalah sebesar 4.691 judul dokumen SNI (44%) dari total judul SNI atau 53,3% terhadap SNI aktif dengan total transaksi sebanyak 14.452 permintaan.

Tabel 4:
Jumlah Permintaan SNI/Tahun dari Tahun 2012—2015

Tahun Permintaan		Permintaan	Total Dokumen SNI
2012	Jumlah permintaan	1.681	9.337
	% terhadap total dokumen	18,0	
2013	Jumlah permintaan	2.312	9.765
	% terhadap total dokumen	23,7	
2014	Jumlah permintaan	1.883	10.161
	% terhadap total dokumen	18,5	
2015	Jumlah permintaan	2.193	10.661
	% terhadap total dokumen	20,6	

Yang menarik adalah cukup banyak dokumen SNI yang tidak pernah diminta melalui PNBPN selama 4 tahun terakhir, yaitu berjumlah 5.981 dokumen atau sebesar 56% dari total SNI. SNI tidak diminta karena (i) sudah diabolisi sehingga tidak digunakan lagi, (ii) sudah kedaluarsa dan tidak sesuai dengan kebutuhan walaupun belum diabolisi, (iii) tidak dibutuhkan karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, dan (iv) tidak diketahui pemakai bahwa SNI tersebut ada.

Jumlah transaksi permintaan SNI yang dipenuhi oleh Perpustakaan BSN selama periode tahun 2012--2015 adalah sebesar 14.452 transaksi. SNI yang paling banyak diminta adalah SNI ISO/IEC 17025:2008 dengan judul "Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi," yaitu dengan jumlah 266 permintaan. Tabel 5 berikut memperlihatkan 10 judul SNI paling banyak diminta selama tahun 2012--2015.

Tabel 5:
10 Judul SNI Paling Banyak Diminta selama Tahun 2012--2015

No	Nomor SNI	Judul	Jumlah diminta
1	SNI ISO/IEC 17025:2008	"Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi"	266
2	SNI ISO 9001:2008(E)	"Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan"	178
3	SNI ISO/IEC 17065:2012	"Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa"	141
4	SNI ISO/IEC 17020:2012	"Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi"	111
5	SNI 0225:2011	"Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)"	106
6	SNI ISO 9000:2008	"Sistem Manajemen Mutu-Dasar-dasar dan Kosakata"	72
7	SNI ISO 50001:2012	"Sistem Manajemen Energi-Persyaratan dengan Pedoman Penggunaan"	71
8	SNI ISO 15189:2012	"Laboratorium Medik-Persyaratan Mutu dan Kompetensi"	66
9	SNI ISO/IEC 17021:2011	"Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen"	64
10	SNI ISO 19011:2012	"Panduan Audit Sistem Manajemen"	58

Judul-judul SNI tersebut memang sangat populer. Terbukti sebanyak lima judul SNI dari 10 yang paling populer tersebut di atas diminta setiap

tahun selama kurun waktu 2012--2015. Judul-judul tersebut adalah sebagai berikut:

1	SNI ISO/IEC 17025:2008	“Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”,
2	SNI ISO 9001:2008(E)	“Sistem Manajemen Mutu–Persyaratan”,
3	SNI 0225:2011	“Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)”,
4	SNI ISO 9000:2008	“Sistem Manajemen Mutu-Dasar-dasar dan Kosakata”, dan
5	SNI ISO/IEC 17021:2011	“Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen”.

Empat judul SNI yang diminta setiap tahun selama tiga tahun pada kurun waktu tahun 2012--2015 adalah sebagai berikut

1	SNI ISO/IEC 17065:2012	“Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa”,
2	SNI ISO/IEC 17020:2012	“Penilaian Kesesuaian-Persyaratan untuk Pengoperasian Berbagai Lembaga Inspeksi”,
3	SNI ISO 50001:2012	“Sistem Manajemen Energi-Persyaratan dengan Pedoman Penggunaan”, dan
4	SNI ISO 19011:2012	“Panduan Audit Sistem Manajemen”.

Hanya satu judul SNI saja dari 10 judul SNI terpopuler tersebut diminta setiap tahun pada dua tahun selama tahun 2012--2015, yaitu SNI ISO 15089:2012 dengan judul “Laboratorium Medik-Persyaratan Mutu dan Kompetensi”.

6. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Dari kajian ini dapat disimpulkan hal-hal berikut.

1. Jumlah SNI yang diminta selama kurun waktu tahun 2012--2015 berjumlah 4.691 judul SNI dari total 10.660 judul SNI atau dari 8.794 judul SNI yang masih aktif. Artinya, ada sebanyak 5.981 judul SNI yang tidak pernah diminta lagi selama kurun tersebut.

2. SNI bertahun lama masih banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat terbukti masih banyak permintaan SNI bertahun di bawah 2010.

3. Pemangku kepentingan pengguna terbesar adalah dari kelompok pelaku usaha, yaitu sebesar 1.605 pengguna, diikuti oleh kelompok masyarakat umum, yaitu sebanyak 1.055 pengguna, kemudian pemerintah atau regulator sebanyak 181 pengguna, dan akademisi sebanyak 157 pengguna.

6.2 Saran

Dari kajian ini dapat disarankan hal-hal berikut.

1. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap SNI-SNI yang lebih dari 5 tahun, khususnya yang masih dibutuhkan oleh pengguna.

2. Perlu dipertimbangkan (dengan kaji ulang) untuk mengabolisi SNI-SNI yang tidak pernah lagi dibutuhkan oleh pemakai.

3. Kajian ini baru dilakukan terhadap permintaan

SNI melalui PNB. Perlu dilakukan kajian yang lebih menyeluruh dengan melibatkan data yang lebih luas seperti data distribusi SNI melalui pengunduhan dari basis data SISNI, data dari

distribusi ke komite teknis, data dari distribusi untuk pengguna internal BSN, data dari distribusi SNI yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar BSN, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- BSN.** 2015. *Manfaat Ekonomi Standar (Economic Benefit of Standards)*. Jakarta: Indonesia: Badan Standardisasi Nasional.
- BSN.** 2009. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BSN.** 2014. *Pengantar Standardisasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BSN.** 2009. SNI 7496:2009 *Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- BSN.** 2015. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang *Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Hasan, I.* 2004. *Analisis data penelitian dengan statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir.** 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Bahasa, Depdiknas.** 2008. "Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional RI".. Dalam *KBBI Daring*: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>, diunduh pada tanggal 25 Februari 2016.
- PUSIDO-BSN.** 2013. *Laporan Tahunan Pusat Informasi dan Dokumentasi (PUSIDO), Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2012*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Saleh, A. R., dan Mustafa, B.** 2009. *Bahan Rujukan Umum*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sunarya, S.** 2012. *Standardisasi dalam Industri dan Perdagangan: Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Wikipedia.** 2015. "Wikipedia: Ensiklopedia Bebas". Dalam *Penerimaan Negara Bukan Pajak*: https://id.wikipedia.org/wiki/Penerimaan_Negara_Bukan_Pajak, diunduh pada tanggal 25 Februari 2016.